

Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi di Indonesia

Ika Kurnia Indriani¹

¹Politeknik Negeri Pontianak, Pontianak, Indonesia
ikakurniaindriani@gmail.com

Abstract

Realizing the regional revenue and expenditure allocation has essential for coping with the COVID-19 pandemic. The assessment of the effect of budget realization attempts to determine the significance of budget realization in the case of COVID-19. This study employs a quantitative methodology and multiple regression analysis. This study uses a saturation sampling of 34 provinces and 93 municipalities throughout Indonesia. The results indicated that (H1) PAD and (H4) DAK had a significant effect, with values of 0.000 and 0.008. The realization of the regional budget influences the region's success in overcoming the pandemic by 76.5% simultaneously. This research demonstrates that the regional budget's capacity significantly impacts efforts to prevent the pandemic in Indonesia.

Keywords: Budget, Revenue, Expenditure, and Pandemic.

Abstrak

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki peran penting dalam penanggulangan pandemi di Indonesia. Penilaian pengaruh realisasi anggaran ini bertujuan untuk melihat signifikansi realisasi anggaran terhadap kasus COVID-19 yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik regresi berganda. Penelitian ini menggunakan sampling jenuh berupa 34 provinsi dan 93 kota di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (H1) PAD dan (H4) DAK berpengaruh signifikan dengan nilai 0,000 dan 0,008. Realisasi anggaran daerah secara simultan berpengaruh terhadap keberhasilan daerah untuk menaggulangi pandemi dengan presentase 76,5%. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas anggaran daerah sangat berpengaruh terhadap penanggulangan pandemi di Indonesia.

Kata Kunci: Anggaran, Pendapatan, Belanja, Daerah, dan Pandemi.

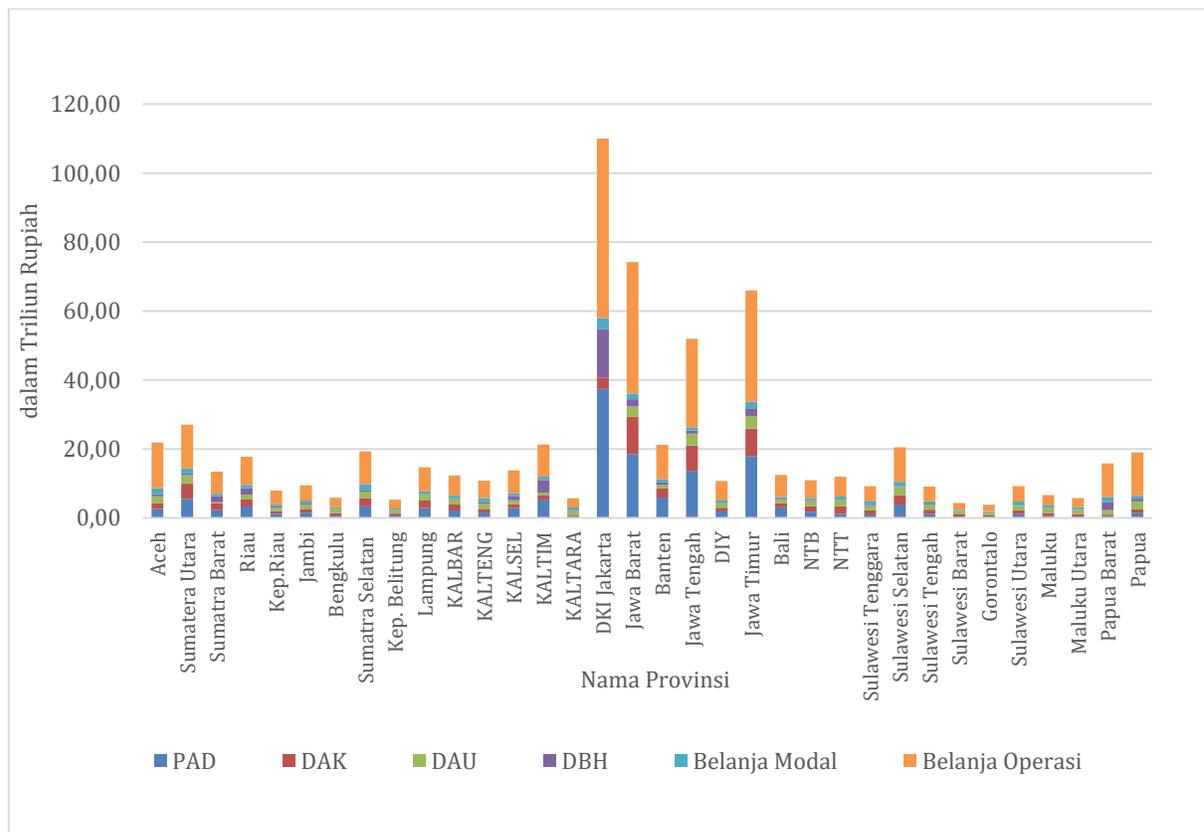
PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 mengubah situasi ekonomi nasional dan daerah. Kondisi ini menuntut pemerintah pusat maupun daerah untuk memanfaatkan anggaran secara optimal dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Jumlah anggaran yang terbatas dan belanja yang semakin meningkat membuat pemerintah harus bekerja secara efektif dan efisien (Mackinnon et al., 2021). Pandemi COVID-19 mengancam ekonomi hingga berakibat kepada resesi ekonomi (Blackman et al., 2020). Seluruh sektor yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dunia seperti sektor jasa, investasi, keuangan, dan produksi mengalami penurunan (McKibbin & Fernando, 2021; OECD, 2020; Septa Soraida, 2022).

Kondisi ini memaksa pemerintah untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran dengan strategi jangka pendek berupa realokasi dan *refocusing* (Basri & Gusnardi, 2021; Muhammad, 2023). Kapasitas anggaran pemerintah daerah berperan penting dalam ekonomi di masa pandemi COVID-19. Pemerintah daerah akan memprioritaskan anggaran belanja untuk membiayai program penanggulangan pandemi COVID-19 (Ahrens & Ferry, 2020; Liao et al., 2021; Wu & Lin, 2020). Program kerja prioritas yang harus direalisasikan adalah penyediaan fasilitas kesehatan, pembelian vaksin COVID-19, dan bantuan sosial bagi masyarakat. Peningkatan anggaran dialokasikan untuk aktivitas pemerintah, perlindungan sosial, kesehatan masyarakat, dan *houselessness and sleeping service* (Nivette et al., 2021). Penambahan jumlah kasus COVID-19 berbanding lurus dengan penambahan anggaran pengeluaran pemerintah daerah sebanyak 5%-10% (Auerbach et al., 2020; Sukadana et al., 2022). Pemerintah daerah

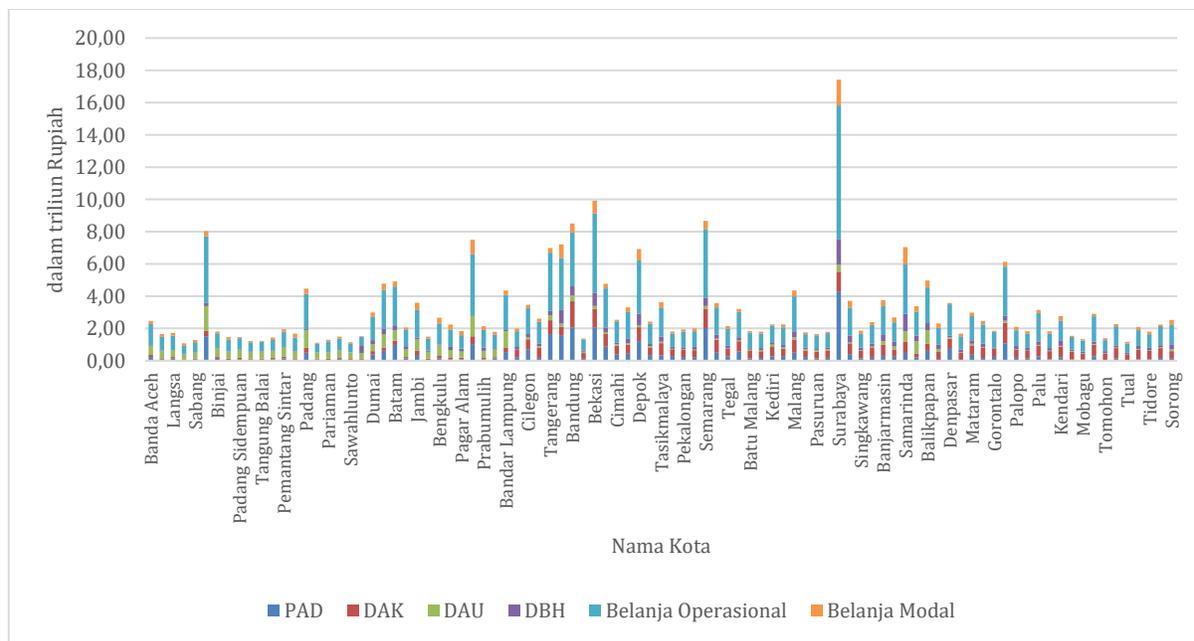
menghadapi tekanan anggaran akibat COVID-19 termasuk kebutuhan program kerja, peningkatan biaya, dan pertumbuhan permintaan masyarakat atas pelayanan publik (Amin et al., 2021; I. K. Indriani, 2022). Penurunan pendapatan pemerintah daerah akan berdampak negatif pada anggaran, sehingga diperlukan manajemen keuangan yang baik agar tidak meningkatkan jumlah hutang (de Jong & Ho, 2021; Heald & Hodges, 2020).

Pada tahun 2020 awal terjadinya COVID-19 di Indonesia pemerintah daerah melaksanakan strategi jangka pendek. APBD berperan penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah di masa pandemi. Realisasi pendapatan dan belanja daerah tingkat pemerintah provinsi tergambar pada grafik 1. Proporsi pendapatan daerah didominasi oleh PAD dan DAU. Sedangkan, belanja daerah sebagian besar direalisasikan untuk belanja operasional. Pemerintah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah memiliki kapasitas anggaran tertinggi di Indonesia pada 2020. Kapasitas anggaran pemerintah kota madya pada tahun 2020 didominasi oleh PAD dan DAK untuk pendapatan daerah. Sedangkan, belanja daerah didominasi oleh belanja operasional. Gambar 2 menunjukkan realisasi APBD tertinggi adalah pemerintah kota Surabaya, Bekasi, Semarang, Tangerang, Medan, dan Palembang.



Gambar 1. Proporsi Realisasi PAD, DAU, DAK, DBH, Belanja Modal, dan Belanja Operasional Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun Anggaran 2020

Sumber: Data diolah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
 Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi, 2021



Gambar 2. Proporsi Realisasi PAD, DAU, DAK, DBH, Belanja Modal, dan Belanja Operasional Pemerintah Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2020

Sumber: Data diolah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota, 2021

Realisasi anggaran menunjukkan kapasitas fiskal daerah dalam menghadapi kondisi tidak terduga seperti pandemi COVID-19. Kapasitas anggaran mempengaruhi keberhasilan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi akibat COVID-19 (OECD, 2020). Kapasitas anggaran pemerintah akan dinilai berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), belanja operasional, dan belanja modal. Jumlah anggaran yang dimiliki pemerintah daerah akan memproyeksikan secara langsung kapasitas fiskal yang dimiliki dalam menghadapi pandemi COVID-19. Penanganan pandemi memerlukan anggaran yang tidak sedikit (United Nation, 2020). Pemerintah daerah memprioritaskan alokasi APBD untuk penanganan pandemi (Susantono, et al., 2020). Penyerapan anggaran menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah di masa pandemi COVID-19 (Iskandar, 2021). Pemerintah daerah masih melakukan penanganan jangka pendek atas pandemi COVID-19 (OECD, 2020). Pandemi COVID-19 akan berpengaruh terhadap prioritas realisasi APBD pemerintah provinsi di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 akan dianalisis dengan penilaian pengaruh kapasitas anggaran pemerintah daerah penanggulangan kasus COVID-19. Analisis ini akan menggunakan hipotesis sebagai dugaan awal. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

- H1: Kapasitas anggaran pemerintah provinsi secara simultan berpengaruh terhadap kasus COVID-19.
- H2: PAD berpengaruh terhadap kasus COVID-19.
- H3: DAU berpengaruh terhadap kasus COVID-19.
- H4: DAK berpengaruh terhadap kasus COVID-19.
- H5: DBH berpengaruh terhadap kasus COVID-19.
- H6: Belanja Operasional berpengaruh terhadap kasus COVID-19.
- H7: Belanja Modal berpengaruh terhadap kasus COVID-19.

KAJIAN PUSTAKA

Kapasitas anggaran pemerintah daerah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh realisasi pendapatan dan belanja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja terdiri dari lima realisasi utama. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Sedangkan, belanja daerah utama terdiri dari belanja operasional dan belanja modal. Berikut ini merupakan penjelasan masing-masing akun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan atas pajak dan retribusi sebagai PAD berdasarkan UU N0. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari alokasi pendapatan APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan fiskal dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU ditujukan untuk menutupi celah fiskal untuk kebutuhan pendanaan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah untuk urusan wajib terkait pelayanan dasar.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan pemerintahan dan kewenangan daerah.
4. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari APBN berdasarkan alokasi persentase tertentu untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pusat dan daerah. Sumber pendapatan dana bagi hasil diperoleh dari pajak, cukai, dan sumber daya alam.
5. Belanja Operasional merupakan pengeluaran rutin pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan operasionalnya selama satu periode anggaran. Belanja operasional daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
6. Belanja modal merupakan pengeluaran rutin pemerintah daerah untuk membiayai penambahan aset tetap dan pembangunan infrastruktur daerah seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan, dan aset tetap lainnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menilai pengaruh realisasi anggaran daerah terhadap penanggulangan pandemi di Indonesia. Hipotesis yang dibangun berdasarkan realisasi PAD, DAU, DAK, DBH, belanja operasional, dan belanja modal sebagai variabel independen (X). Kemudian kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di seluruh wilayah provinsi dan kotamadyamenjadi variabel dependen (Y). Penilaian pengaruh ini menggunakan analisis statistik berupa uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapasitas anggaran pemerintah daerah memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan sebuah negara dalam menanggulangi pandemi COVID-19 (Anessi-Pessina et al., 2020). Gambaran mengenai variabel pada penelitian ini dituangkan dalam hasil uji statistik deskriptif. Hasil uji menunjukkan bahwa jumlah data yang valid sebanyak 127. Kondisi variabel independen

rata-rata PAD (X1) sebesar 26,70 dengan standar deviasi sebesar 1,52. DAU (X2) memiliki rata-rata 27,05 dengan standar deviasi 2,48. DAK (X3) memiliki rata-rata 26,24 dengan standar deviasi 1,24. DBH (X4) memiliki rata-rata 25,35 dengan standar deviasi 1,43. Belanja operasional (X5) memiliki rata-rata 28,29 dengan standar deviasi 1,01. Belanja modal (X6) memiliki rata-rata 26,38 dengan standar deviasi 0,95. Sedangkan variabel dependen Kasus COVID-19 (Y) mempunyai rata-rata 9,00 dengan standar deviasi 1,64. Uji asumsi klasik sebagai proses penilaian keabsahan persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak bias, tepat, dan konsisten (Sugiyono, 2017). Uji asumsi klasik dilakukan dengan melaksanakan uji normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas (Sugiyono, 2017; Sujarweni, 2016). Hasil uji asumsi klasik terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Deskripsi Hasil
Normalitas	Hasil uji normalitas menunjukkan data terdistribusi normal. Hal ini dilihat dari grafik <i>normal p-p of regression standardized residual</i> dimana data berada pada kondisi normal dengan titik-titik pada grafik telah mendekati sumbu diagonalnya. Uji <i>Kolmogorov Smirnov</i> menghasilkan nilai <i>Asymp.Sig</i> sebesar 0,20. Nilai ini lebih besar dari 0,05.
Multikolinieritas	Hasil uji menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam regresi. Hal ini dilihat dari hasil uji pada variabel dependen diperoleh nilai VIF untuk PAD 7,44; DAU 1,15; DAK 8,91; DBH 3,35; belanja operasional 7,00; dan belanja modal 5,94.
Autokorelasi	Hasil uji menunjukkan bahwa DW = 1,901 berada di antara daerah tidak terjadi autokorelasi.
Heterokedastisitas	Hasil uji glejser menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 untuk masing-masing variabel independen PAD 0,16; DAU 0,71; DAK 0,23; DBH 0,10 belanja operasional 0,16 dan belanja modal 0,91.

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2023

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen yaitu PAD, DAK, belanja operasional, dan belanja modal terhadap variabel dependen kasus COVID-19. Berdasarkan tabel uji regresi berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -17,966 + 0,970 X1 + 0,037 X2 - 0,524 X3 + 0,108 X4 + 0,426 X5 - 0,020 X6 + e$$

Hasil uji simultan (uji-F) maka diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,01 karena nilai sig. lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh signifikan dan simultan antara PAD, DAU, DAK, DBH, belanja operasional, dan belanja modal terhadap penanggulangan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Hasil uji signifikansi (uji-t) parsial diketahui bahwa PAD dan DAK memiliki nilai signifikan 0,000 dan 0,008. DAU, DBH, belanja operasional, dan belanja modal memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa PAD dan DAK memiliki pengaruh terhadap penanggulangan pandemi, namun DAU, DBH, belanja operasional, dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penanggulangan pandemi. Namun, variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan keterkaitannya dengan penanggulangan pandemi di Indonesia sebesar 76,5%. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji koefisien determinasi (R square) sebesar 0,765 atau sebesar 76,5%. Sedangkan, sisanya 23,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variabel tersebut. Ringkasan hasil uji regresi terdapat pada Tabel 2.

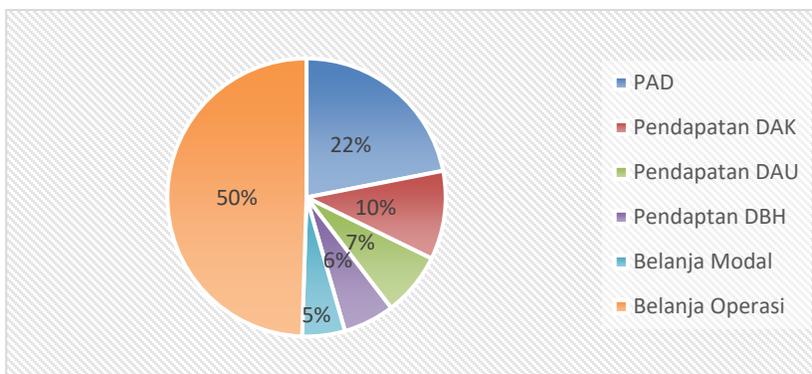
Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien regresi	T	Sig.	Hipotesis
(konstanta)	-17.966	-4.878	0.000	
PAD (X1)	0.970	6.270	0.000	Diterima
DAU (X2)	0.037	1.182	0.240	Ditolak
DAK (X3)	-0.524	-2.706	0.008	Diterima
DBH (X4)	0.108	1.167	0.245	Ditolak
Belanja Operasional (X5)	0.426	0.978	0.330	Ditolak
Belanja Modal (X6)	-0.020	-0.109	0.913	Ditolak
Uji-F		65,150		
Sig. Uji-F		0,000		
R ²		0,765		
Adjusted R ²		0,753		

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2023

PEMBAHASAN

Pemerintah daerah menghadapi tekanan anggaran akibat COVID-19 termasuk kebutuhan program dan pelayanan publik, peningkatan biaya, dan pertumbuhan permintaan masyarakat atas pelayanan publik (Roziqin et al., 2021). Anggaran yang direlokasi berasal dari anggaran non prioritas dan belanja modal yang memiliki kaitan dengan pandemi (Hasibuan et al., 2020). Pemerintah daerah di Indonesia baik provinsi, kabupaten, dan kota masih sangat bergantung kepada transfer dana dari pemerintah pusat. Tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih rendah, walaupun sudah dilaksanakannya otonomi daerah (I. K. et al Indriani, 2021, 2022; I. K. Indriani, 2023). Kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah pusat untuk mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah di masa depan. Gambar 3 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2021 didominasi oleh PAD sebesar 22%, DAK 10%; DAU 7%; dan DBH 6%. Proporsi realisasi belanja daerah di masa pandemi didominasi oleh belanja operasional 50%. Sedangkan, realisasi belanja modal hanya 5%.



Gambar 5. Persentase Proporsi Kapasitas Anggaran pada Masa Pandemi COVID-19

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2022

PAD dan DAK berpengaruh signifikan kapasitas anggaran daerah dalam menanggulangi kasus COVID-19 yang terjadi pada daerah di Indonesia. Realisasi PAD dan DAK berpengaruh signifikan terhadap kasus COVID-19. Hal ini terjadi akibat pemerintah daerah pada masa pandemi terjadi penurunan jumlah realisasi dana transfer pemerintah pusat akibat realokasi

anggaran (Muhyiddin & Nugroho, 2021). Kapasitas anggaran dari PAD dan DAK sebagai sumber utama dalam menghadapi COVID-19.

PAD menjadi sumber utama penerimaan daerah di masa pandemi sangat mempengaruhi kapasitas anggaran dalam menanggulangi kasus COVID-19 (Basri & Gusnardi, 2021). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang diperoleh dari pajak dan retribusi yang sangat berpengaruh terhadap kapasitas anggaran pemerintah provinsi. Jumlah realisasi dipengaruhi oleh sistem pengelolaan yang digunakan oleh pemerintah. Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi lokal agar dapat meningkatkan PAD (Hidayat, et al., 2007). PAD memiliki peranan besar di dalam struktur APBD daerah, namun porsi PAD terhadap APBD masing kecil (Hidayat, et al., 2007). Pemerintah daerah masih bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat karena rendahnya pendapatan asli daerah (Endaryanto et al., 2018). Pendapatan dana alokasi khusus (DAK) memiliki proporsi yang cukup besar kepada kapasitas fiskal.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 5 ayat (48) menjelaskan bahwa “dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” (Republik Indonesia, 2014). DAK diperuntukan untuk membiayai program kerja pemerintah pusat yang ada di daerah, sehingga penggunaannya terbatas. Kapasitas fiskal daerah dibatasi oleh aturan penggunaan anggaran, khususnya pada pengeluaran non modal seperti gaji (Green & Loualiche, 2020). Pendapatan DAK sangat mempengaruhi kapasitas anggaran pemerintah provinsi dalam menghadapi pandemi. Penanggulangan pandemi covid 10 membutuhkan anggaran yang cukup besar khususnya pada bidang kesehatan. Pemerintah daerah masih mengandalkan DAU dan DAK dalam struktur APBD (Hidayat, et al., 2007). Belanja operasional dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kasus COVID-19 disebabkan sebagian besar anggaran belanja operasional dan belanja modal pemerintah daerah otonomi digunakan untuk membayar gaji pegawai dan pembangunan infrastruktur (Robiyanur et al., 2017).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran pemerintah daerah sangat berperan dalam menanggulangi pandemi. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk pembangunan, pelayanan sosial, dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan masih relatif rendah (Alfi & Nuraini, 2018).

SIMPULAN

Secara simultan terdapat pengaruh kapasitas anggaran terhadap kasus COVID-19. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian hipotesis dimana nilai sig. 0,000, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji f dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia khusus yang terjadi di daerah dapat ditanggulangi dengan kapasitas anggaran pemerintah daerah yang baik. Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara optimal akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pada bidang kesehatan menjadi sangat krusial untuk dihadirkan dalam masa pandemi saat ini.

Secara parsial terdapat pengaruh dan tidak berpengaruh pada kapasitas anggaran pemerintah daerah terhadap kasus COVID-19. Terdapat pengaruh secara signifikan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kasus COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig. 0,000 maka

dengan ini hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial PAD berpengaruh signifikan terhadap kasus COVID-19. Terdapat pengaruh signifikan atas Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kasus COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig. 0,008 maka dengan ini hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial DAK berpengaruh signifikan terhadap kasus COVID-19. Tidak ada pengaruh secara signifikan atas Dana Alokasi Umum terhadap kasus COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig. 0,240 maka dengan ini hipotesis ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa belanja operasional secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kasus COVID-19. Terdapat pengaruh signifikan atas Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap kasus COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig. 0,245 maka dengan ini hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kasus COVID-19. Terdapat pengaruh signifikan atas belanja operasional terhadap kasus COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig. 0,330 maka dengan ini hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kasus COVID-19. Terdapat pengaruh signifikan atas belanja modal terhadap kasus COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig. 0,913 maka dengan ini hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kasus COVID-19. Kapasitas anggaran pemerintah daerah (PAD, DAU, DAK, DBH, belanja operasional, dan belanja modal) memiliki pengaruh sebesar sebesar 76,5 % terhadap keberhasilan penanggulangan pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahrens, T., & Ferry, L. (2020). Financial resilience of English local government in the aftermath of COVID-19. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(5), 813–823. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0098>
- Alfi, S. A. F., & Nuraini, I. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2000), 500–513.
- Amin, R. M., Febrina, R., & Wicaksono, B. (2021). Handling COVID-19 from a Collaborative Governance Perspective in Pekanbaru City. *Jurnal Bina Praja*, 13, 1–13. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.1-13>
- Anessi-Pessina, E., Barbera, C., Langella, C., Manes-Rossi, F., Sancino, A., Sicilia, M., & Steccolini, I. (2020). Reconsidering public budgeting after the COVID-19 outbreak: key lessons and future challenges. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(5), 957–965. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0115>
- Auerbach, A., Auerbach, A. J., Gale, W., Lutz, B., & Sheiner, L. (2020). *Fiscal Effects of COVID-19*. 1–98.
- Basri, Y. M., & Gusnardi, G. (2021). Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 33–48. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9803>
- Blackman, A., María Ibáñez, A., Izquierdo, A., Keefer, P., Moreira, M. M., Schady, N., & Serebrisky, T. (2020). *Public Policy to Tackle Covid-19: Recommendations for Latin America and the Caribbean*. 46. <https://publications.iadb.org/publications/english/document/Public-Policy-to-Tackle->

Covid-19-Recommendations-for--Latin-America-and-the-Caribbean.pdf

- de Jong, M., & Ho, A. T. (2021). Emerging fiscal health and governance concerns resulting from COVID-19 challenges. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 29(6), 1–11. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0137>
- Endaryanto, T., Firdaus, M., & Siregar, H. (2018). Analysis of economic and financial performance in lampung. *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 20(1), 95–102.
- Hasibuan, G. L., Dermawan, D., Ginting, H. S., & Muda, I. (2020). Allocation of COVID-19 Epidemic Funding Budgets In Indonesia. *International Journal of Research and Review*, 7(5), 75–80.
- Heald, D., & Hodges, R. (2020). The accounting, budgeting and fiscal impact of COVID-19 on the United Kingdom. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(5), 785–795. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0121>
- Indriani, I. K. et al. (2021). Pengaruh Kapasitas Anggaran Terhadap Kasus Covid 19 Studi Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 12(November), 296–321.
- Indriani, I. K. et al. (2022). The Effect Financial Condition on Covid 19 Case (Empirical Study on Local Government in West Kalimantan). *Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1394–1410. <https://doi.org/10.1002/9781119558361.ch20>
- Indriani, I. K. (2022). Kondisi Kapasitas Anggaran Pemerintah Kota di Indonesia-Studi Proyeksi Menghadapi Pandemi COVID-19 Oleh: Ika Kurnia Indriani (Prodi Diploma IV Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak). *Neraca, Jurnal Pendidikan, Jurnal Ekonomi, Ilmu Volume, Akuntansi*, 6(2), 156–168. <https://doi.org/10.31851/neraca.v6i2.9307>
- Indriani, I. K. (2023). Financial Condition Of Local Government Aftermath Of Covid 19 Pandemic-Archival. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 218–235. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.200>
- Jackson, J. K., Nelson, R. M., Sutter, K. M., & Sutherland, M. D. (2021). *Specialist in International Trade and Finance Specialist in Asian Trade and Finance*.
- Liao, W. J., Kuo, N. L., & Chuang, S. H. (2021). Taiwan's budgetary responses to COVID-19: the use of special budgets. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 29(6), 24–32. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0128>
- MacKinnon, K. R., Mykhalovskiy, E., Worthington, C., Gómez-Ramírez, O., Gilbert, M., & Grace, D. (2021). Pay to skip the line: The political economy of digital testing services for HIV and other sexually transmitted infections. *Social Science and Medicine*, 268. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113571>
- McKibbin, W., & Fernando, R. (2021). The global macroeconomic impacts of covid-19: Seven scenarios. *Asian Economic Papers*, 20(2), 2–30. https://doi.org/10.1162/asep_a_00796
- Muhammad, A. (2023). Refocusing on COVID-19 Local Budgets and Achieving Absorbability of the Recovery of the Local Economic Situation A Systematic Study. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 3(1), 1–12.

<https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.3.1.1-12>

- Muhyiddin, M., & Nugroho, H. (2021). A Year of Covid-19: A Long Road to Recovery and Acceleration of Indonesia's Development. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.36574/jpp.v5i1.181>
- Nivette, A., Ribeaud, D., Murray, A., Steinhoff, A., Bechtiger, L., Hepp, U., Shanahan, L., & Eisner, M. (2021). Non-compliance with COVID-19-related public health measures among young adults in Switzerland: Insights from a longitudinal cohort study. *Social Science and Medicine*, 268(September 2020), 113370. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113370>
- OECD. (2020). The impact of the COVID-19 crisis on regional and local governments : Main findings from the joint CoR-OECD survey. *OECD Regional Development Papers*, 5.
- Robiyatur, M., Masjaya, & Riady, G. (2017). Analisis Penilaian Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus Kec. Muara Wahau). *Jurnal Administrative Reform ...*, 2(1), 61–73. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/500>
- Roziqin, A., Retnandari, N., Fajrina, A., Sihidi, I., & Kamil, M. (2021). The Local Government and Creative Industry: Experience from Batik Tulis Lasem Industries. *Jurnal Bina Praja*, 13(3), 419–429. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.419-429>
- Septa Soraida. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Sebelum Dan Selama Pandemi. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 78–82. <https://doi.org/10.56127/jekma.v1i2.154>
- Sugiono, P. D. (2014). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D). In *Metodologi Penelitian*.
- Sujarweni, V. W. (2016). Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS. In *Animal Genetics*.
- Sukadana, I. K., Utama, I. N., & Karma, N. M. S. (2022). Covid-19 Prevention Handling Model Bali Province Government. *Sociological Jurisprudence Journal*, 5(1), 25–31. <https://doi.org/10.22225/scj.5.1.2022.25-31>
- Wu, S., & Lin, M. (2020). Analyzing the Chinese budgetary responses to COVID-19: balancing prevention and control with socioeconomic recovery. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(5), 929–937. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-08-2020-0142>